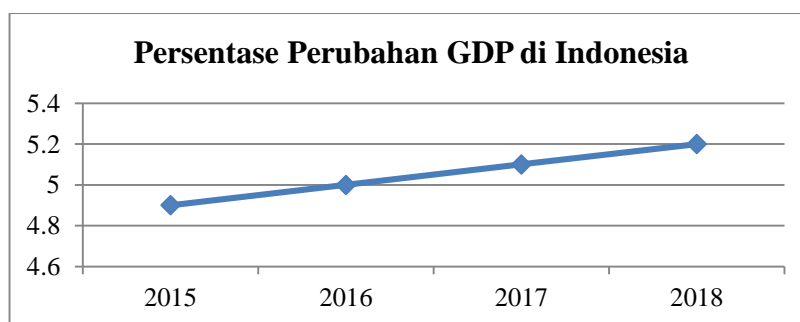


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Situasi ekonomi yang berkembang saat ini banyak memberikan perubahan dalam perekonomian nasional terutama semakin ketatnya dunia persaingan bisnis, hal ini dapat dilihat dari para pelaku ekonomi baik domestik maupun asing yang tidak ragu-ragu melakukan aktivitas usahanya di Indonesia. Saat ini Indonesia terus mencapai tingkat pertumbuhan PDB yang kuat sejak 2008 sekitar 5% atau lebih per tahun yang merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara (KPMG, 2018).



Sumber: www.okezone.com, KPMG 2018, dan data.worldbank.org

Gambar I.1 Persentase Perubahan GDP di Indonesia

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, berdasarkan survei yang dilakukan berbagai lembaga baik dalam negeri ataupun luar negeri, kontribusi sektor manufaktur di Indonesia memiliki pengaruh yang besar terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) (www.economy.okezone.com).

Perubahan yang terus terjadi saat ini, mengharuskan setiap perusahaan memiliki karakteristik tersendiri agar dapat lebih maju dan berkembang serta dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Ada banyak cara yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk dapat berkembang dan mendapatkan keuntungan yang maksimal, salah satu di antaranya yaitu dengan memiliki tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Tata kelola perusahaan mengacu pada aturan, proses, dan hukum, serta bagaimana perusahaan dioperasikan, dikontrol, dan diatur. Hal ini menjelaskan hak dan tanggung jawab dari partisipan perusahaan seperti pemegang saham, direksi, pejabat dan manajer, dan pemangku kepentingan lainnya, serta aturan dan prosedur untuk membuat keputusan perusahaan. Struktur tata kelola perusahaan yang didefinisikan dengan baik ini memiliki maksud untuk menguntungkan semua pemangku kepentingan perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan cara yang sah dan etis, sesuai dengan *best practices* dan tunduk pada semua peraturan perusahaan (Gitman dan Zutter, 2012)

Tata kelola perusahaan memainkan peran penting untuk peningkatan profitabilitas perusahaan. Peningkatan laba perusahaan sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan (Gill dan Mathur, 2011). Tata kelola perusahaan juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati, *et al.*, 2004).

Organization For Economic Co-Operation and Development (OECD) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Tata kelola perusahaan pada dasarnya menyangkut masalah siapa (*who*) yang seharusnya mengendalikan jalannya kegiatan perusahaan dan mengapa (*why*) harus dilakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan perusahaan (Mutamimah, 2013:47). Yang dimaksud dengan “siapa” adalah para pemegang saham sedangkan “mengapa” adalah karena adanya hubungan antara para pemegang saham dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) mengatakan bahwa GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, setiap perusahaan harus memastikan bahwa peningkatan kinerja perusahaan, perlindungan kepentingan *stakeholders*, dan pembuatan kebijakan perusahaan harus dilakukan sesuai dengan asas *corporate governance* di semua jajaran perusahaan. Asas *corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kesetaraan dan keadilan diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (Zarkasyi, 2008).

Tata kelola perusahaan yang kuat pun diperlukan untuk semua organisasi bisnis karena memainkan peran penting dalam pengelolaan perusahaan di negara maju ataupun berkembang. Negara-negara maju berbeda dari negara-

negara berkembang dalam banyak hal. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, tata kelola perusahaan yang baik merupakan alat penting bagi perusahaan di era globalisasi ini. Dengan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan meningkatkan akses dalam berbagai aspek, tata kelola perusahaan yang baik berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi yang mengurangi kerentanan krisis keuangan (Achchuthan dan Kajanathan, 2013).

Sesuai dengan sistem hukum *Europe Continental* yang dianut di Indonesia, maka organ utama perusahaan-perusahaan di Indonesia terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris, dan dewan direksi. Organ utama memainkan peranan yang penting dalam implementasi tata kelola perusahaan secara efektif. Penelitian ini memfokuskan pada salah satu organ utama perusahaan, yaitu dewan komisaris. Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan Terbatas (PT). Di Indonesia dewan komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris. Secara umum tugas dewan komisaris adalah mengawasi kinerja suatu perusahaan atau organisasi dan memberikan masukan kepada dewan direksi serta mengkaji dan memberikan persetujuan atas keputusan yang dibuat manajemen perseroan.

Keefektifan dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tentunya tak lepas dari kebutuhan untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham, dimana salah satunya adalah dengan dicapainya laba yang besar oleh

perusahaan. Laba adalah indikator yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Informasi tentang laba mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis suatu perusahaan dalam mencapai tujuan operasi yang ditetapkan (Siallagan, 2006). Kreditor dan investor menggunakan laba untuk mengevaluasi kinerja manajemen, memperkirakan *earnings power*, dan untuk memprediksi laba di masa yang akan datang. Laba yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen perusahaan dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Jika laba seperti ini digunakan investor untuk nilai pasar perusahaan, maka laba tersebut tidak dapat menjelaskan nilai perusahaan yang sebenarnya. Kajian pustaka terdahulu mengenai praktik *good corporate governance* telah menerapkan ukuran berbasis kinerja, seperti *return on equity* (ROE) dan *return on asset* (ROA) untuk kinerja perusahaan (Rendy dan Shiddiq, 2014; Johl, *et al.*, 2013; Liang, *et al.*, 2013; Chou dan Buchdadi, 2017; Susy dan Elsa, 2013; Narwal dan Jindal, 2015).

Selain itu menurut penelitian sebelumnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ROA ataupun ROE sebagai ukuran kinerja perusahaan, di antaranya frekuensi rapat (*number of board meetings*), jumlah kehadiran rapat (*board meetings attendance*), ukuran dewan komisaris dan direksi (*board size*), *audit committee*, dan proporsi dewan independen (*board independent proportion*) yang digunakan sebagai penentu *corporate governance* (Chou dan Buchdadi, 2017; Rendy dan Shiddiq, 2013; Chung, *et al.*, 2013; Liang, *et al.*, 2013).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kim (2016) frekuensi rapat dewan direksi (*board meetings*) perusahaan membahas, mengevaluasi, dan mungkin menyetujui berbagai masalah seperti membayar dividen, membuat keputusan investasi atau menunjuk CEO. Terkait beberapa masalah penting (misalnya, mengadopsi perjanjian merger atau mengubah beberapa kebijakan perusahaan), hukum perusahaan umumnya mengamanatkan organ utama perusahaan seperti dewan direksi dan dewan komisaris untuk membuat keputusan penting tersebut, karena itu rapat dewan direksi dan rapat dewan komisaris dianggap memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Namun, terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya hubungan yang berpengaruh antara frekuensi rapat dengan kinerja perusahaan seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajrina, *et al.* (2016).

Sementara itu menurut Chung, *et al.* (2013) suatu keputusan dan rencana perusahaan dibuat dalam rapat dewan. Dengan kata lain, para pemangku kepentingan suatu perusahaan harus menghadiri rapat dewan karena mereka memiliki tanggung jawab untuk memantau, menetapkan, dan mengawasi perusahaan atau membuat suatu keputusan strategis. Salah satu tugas utama para dewan, terutama untuk organ inti perusahaan, adalah menghadiri rapat dewan karena rapat dewan adalah alat utama bagi para dewan untuk mengumpulkan informasi, membuat keputusan, dan memantau manajemen (Adams dan Ferreira, 2008). Oleh karena itu, menghadiri rapat dewan merupakan tanggung jawab penting dan harus dikaitkan dengan kinerja

perusahaan. Dengan demikian, jumlah kehadiran rapat dianggap memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Selanjutnya terkait hubungan antara ukuran dewan direksi ataupun dewan komisaris dengan kinerja perusahaan masih menjadi perdebatan apakah memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan atau tidak. Beberapa literatur sebelumnya seperti yang dikemukakan oleh Coles *et al.* (2008) menyatakan bahwa ukuran dewan yang lebih besar memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan, memberikan pemantauan yang lebih besar diikuti hasil penelitian oleh Isik & Ince (2016) yang menemukan efek positif yang signifikan antara ukuran dewan dan kinerja. Semakin besar ukuran anggota dewan komisaris semakin meningkat kinerjanya dalam memonitor keseluruhan manajemen sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nguyen (2015) dan Arora dan Sharma (2016) bahwa *board size* tidak mempengaruhi kinerja perusahaan secara signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut mengenai beberapa faktor tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan, merupakan hal yang perlu diperhatikan dan dicermati lebih dalam oleh masing-masing perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian sebelumnya yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola perusahaan dan hubungan-hubungannya dengan variabel yang lain sudah mulai menjadi objek penelitian yang dibahas dan diteliti. Namun masih terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian-penelitian tersebut. Itulah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh frekuensi rapat, jumlah kehadiran rapat, dan

ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan dalam hal ini ROA. Data penelitian yang akan dilakukan diambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2016, data tersebut adalah data paling baru yang sudah tersedia. Oleh karena itu dapat diambil judul untuk penelitian ini adalah **“Pengaruh Frekuensi Rapat, Jumlah Kehadiran Rapat, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah frekuensi rapat komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
2. Apakah jumlah kehadiran rapat komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah frekuensi rapat komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah jumlah kehadiran rapat komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

3. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan seperti sebagai berikut:

1. Manfaat Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan perbandingan-perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber tambahan informasi dan masukan untuk pembuatan kebijakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).